

"Kelemahan Rupiah atau (Dampak) Penguatan Dolar?"

Oleh: **Lukas O. M. Manalu***

Konsolidasi perekonomian Amerika Serikat berdampak pada menguatnya nilai dolar, dan di sisi lain membuat mata uang banyak negara di dunia kelimpungan. Tidak terkecuali rupiah, pun ikut mengalami imbas negatif karena semakin perkasanya dolar. Walaupun demikian, patut disyukuri bahwa fundamental ekonomi Indonesia yang baik, membuat rupiah tidak terperosok dalam seperti yang dialami beberapa negara lain.

Argentina misalnya, mengalami penurunan nilai mata paling parah di dunia. Peso meluncur tajam hingga -51,67% dibanding nilai awal tahun 2018. Nilai mata uang Turki, Lira, juga merosot sebesar -43,85%, disusul Real Brazil turun 20,26%. Terkait Lira, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, segera mengarahkan telunjuknya ke Amerika Serikat. Walaupun banyak negara yang mengalami dampak negatif karena menguatnya dollar, tetapi Erdogan menuding Amerika Serikat sengaja ingin menghancurkan Turki melalui kebijakan mereka.

Yang menarik, di Indonesia yang mengalami depresiasi nilai rupiah, hingga minggu ini sekitar 7% dibanding awal tahun 2018, orang tidak menuding Amerika Serikat sebagai penyebabnya. Memanfaatkan hangatnya suasana politik menjelang pilpres 2019, sejumlah orang menyalahkan Presiden Jokowi dan team ekonominya. Sebagian berusaha untuk memanfaatkan situasi ini untuk meraih dukungan untuk dirinya sebagai calon legislatif dan untuk capres yang didukung.

Menghadapi situasi global yang berdampak pada rupiah, jelas tidak dapat dengan sikap pesimis, apalagi berusaha memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Sebaliknya yang dibutuhkan adalah sikap positif dan dukungan kepada pemerintah.

Tenang Namun Waspada

Apakah dampak penguatan dolar yang membuat rupiah terdepresiasi mengkhawatirkan? Kekhawatiran jelas tidak dapat ditepis atau diingkari. Sejumlah hutang

yang jatuh tempo dalam mata uang dolar tentu saja akan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan tidak bisa menghindari kebutuhan dana yang lebih besar untuk membayar hutang. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku untuk produksi mereka, seperti perusahaan farmasi, harus mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pengadaan bahan baku yang mereka butuhkan.

Di sisi lain, mereka tidak mungkin bisa segera mengonversi tambahan biaya yang dikeluarkan dengan menaikkan harga. Karena hal itu akan berdampak pada daya beli masyarakat dan tentu saja inflasi yang selama ini terjaga rendah. Menginjak tuas rem dengan sangat dalam untuk mengurangi produksi, juga jelas bukan pilihan yang tepat. Dampaknya jelas akan menurunkan *cash inflow* perusahaan yang dapat berdampak multi dimensi, masalah baru yang komplikatif bagi perusahaan.

Walaupun penurunan nilai rupiah kali ini tergolong dalam, tetapi menguatnya dolar yang berimbas pada rupiah bukanlah pengalaman baru bagi pemerintah dan pengusaha. Jokowi yang baru 4 tahun menjadi presiden, bukanlah orang baru di dunia bisnis dan pemerintahan. Demikian juga dengan tim ekonomi kabinet kerja, seperti Sri Mulyani, yang berpengalaman memimpin bank dunia sehingga kapasitas dan kemampuannya tidak perlu diragukan.

Di berbagai kesempatan, saya bertemu dengan pengusaha. Sebagai konsultan bisnis di bidang manajemen strategik, saya terkesan melihat kepiawaian mereka mengatasi masalah terkait naik turunnya nilai dolar. Alih-alih tertekan, mereka justru tidak jarang menemukan solusi strategik.

Mereka tidak terutama menyalahkan pihak lain, tetapi justru memperbaiki kinerja internal. Pemborosan-pemborosan yang sering terjadi di perusahaan ketika situasi ekonomi kondusif menjadi sasaran pertama yang dikoreksi. Bahkan, diantara perusahaan-perusahaan tersebut ada yang tetap mempertahankan pilihan kebijakan tersebut ketika kondisi perekonomian berangsur membaik. Perusahaan menggunakan penghematan yang dihasilkan untuk memberikan *reward* dan mengembangkan kemampuan karyawan.

Pemimpin perusahaan seperti ini memilih sikap positif terlebih dahulu sebelum bertindak. Masuk akal. Karena tidak ada orang yang dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam kondisi tertekan atau stres. Betapa luar biasanya mereka.

Tidak ada perusahaan termasuk negara yang tidak pernah mengalami masalah atau kemunduran dalam perjalanannya. Tetapi di bawah kepemimpinan visioner, mereka memiliki perencanaan strategis yang brilian dan *leverage* membuat lompatan pencapaian di masa depan. Mereka sudah memperhitungkan guncangan-guncangan yang mungkin di masa depan, sehingga tetap tenang menghadapinya ketika hal itu terjadi.

Bagaimana dengan Indonesia? Majalah Globe Asia pernah menetapkan Joko Widodo sebagai “Transformational President.” Sebutan ini tentu saja memiliki pertimbangan, bukan asal-asalan. Hughes, Ginnett dan Curphy (2015), menyebutkan seorang pemimpin transformasional memiliki visi yang baik, retorik, memiliki keterampilan manajemen yang mengesankan sehingga mampu membangun ikatan emosional yang kuat dengan pendukungnya.

Mengenai visi dan keterampilan manajemen Jokowi, dapat dilihat dari program pembangunan yang sudah dilaksanakan selama 4 tahun ini. Mengesampingkan harga BBM yang kini sama dari Aceh hingga Papua, pembangunan infrastruktur dan bendungan serta proyek listrik 35.000 KW, menunjukkan Presiden Joko Widodo dan kabinetnya memiliki visi yang sangat jauh ke depan. Visi itu juga sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan para pendiri bangsa.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan usaha yang sangat jelas untuk menyelesaikan ketimpangan antar daerah (*regional imbalance*). Pembangunan yang berpusat di Jawa selama orde baru –dan diteruskan selama pemerintahan reformasi sebelum Joko Widodo- membuat daerah-daerah di luar Jawa bertahan sebagai daerah yang tertinggal di banding pulau Jawa. Hal itu membuat pengusaha selama ini enggan membangun pabrik baru di daerah. Karena mereka akan menghadapi masalah biaya tinggi untuk pengadaan bahan baku dan distribusi produk yang tidak didukung infrastruktur jalan yang layak.

Karena itu, pembangunan jalan tol di Sumatera, Jawa hingga Indonesia Timur yang menghubungkan provinsi dan kota-kota di Indonesia memberi peluang untuk pembangunan industri-industri baru di daerah. Pengusaha tidak perlu khawatir lagi bagaimana transportasi untuk pengadaan barang dan distribusi produk yang dihasilkan karena jalan tol baru yang dibangun sangat mendukung kelancaran transportasi. Demikian juga proyek listrik 35.000 MW memastikan ketersediaan listrik untuk industri yang akan dibangun.

Dampaknya pada rakyat pun jelas. Bagi mereka tersedia banyak lapangan kerja di daerah. Hal tersebut jelas akan berkorelasi dan signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena itu, pembangunan jalan tol tidak dimaksudkan untuk lintasan mobil orang-orang kaya. Tetapi, untuk mendukung pembangunan di daerah. Supaya masyarakat di semua daerah Indonesia dapat menikmati pembangunan secara adil dan merata.

Visi presiden yang didukung strategic thinking, membangun masyarakat yang sejahtera di masa depan, juga tampak dari pembangunan bendungan-bendungan besar di berbagai daerah di tanah air. Indonesia sudah lama disebut sebagai negara agraris, namun dalam kenyataannya pemerintah masih sering mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan petani, mereka bukan masyarakat yang tergolong sejahtera. Ini ironis untuk sebuah negara yang disebut negara agraris.

Karena itu pembangunan 49 bendungan besar itu dimaksudkan sebagai leverage untuk mengantarkan masyarakat --yang menurut data BPS mayoritas masih berada di sektor pertanian-- menikmati hidup yang sejahtera. Bendungan dan irigasi membuat petani dapat menanam lebih dari sekali, sehingga mereka bisa terus produktif sepanjang tahun. Bagi masyarakat lain di luar petani, produksi hasil pertanian yang terus menerus juga akan menjamin ketersediaan pangan yang berlimpah dan terjangkau.

Melihat kecenderungan tersebut, kita dapat membayangkan masa depan bangsa yang hebat di masa depan. Masa depan Indonesia ke depan sangat menjanjikan, demikian juga dengan perekonomiannya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita perfect 100%. Pasti tetap ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Tetapi kemampuan

manajerial Presiden Joko Widodo, didukung menteri-menteri yang *capable*, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di atas 5%, kita sebagai warga negara bisa memilih sikap yang tenang, namun tetap waspada.

Konsolidasi Indonesia

Kejadian (*event*) yang sudah berlalu atau berlangsung tidak mungkin dirubah. Tetapi, tanggapan (*respon*) positif atau negatif seseorang terhadap situasi tersebut akan membuat perbedaan yang besar hasil (*outcome*) yang diraih. Capaian yang diraih oleh orang yang memiliki sikap positif dengan yang bersikap negatif, tidak mungkin sama.

Kondisi rupiah yang mengalami depresiasi sebagai dampak dari penguatan dolar dan kemungkinan dipengaruhi sentimen negatif terhadap negara-negara berkembang, tidak mungkin kita rubah. Apapun faktor eksternal yang menjadi penyebabnya, hal tersebut sudah terjadi. Tetapi, dengan respon yang tepat posisi rupiah ke depan pasti dapat diperbaiki dan kembali menguat.

Pemerintah saat ini sedang berusaha dan memberikan respon yang tepat menghentikan laju penurunan nilai rupiah. Defisit neraca perdagangan yang dapat menimbulkan sentimen negatif akan diselesaikan dengan menerbitkan lima strategi, yakni penggunaan biodiesel 20 persen sebagai substitusi impor, menaikkan PPh 22 impor barang konsumsi, meningkatkan penggunaan komponen lokal (TKDN), kemudahan layanan e-commerce dan assesmen impor barang konsumsi melalui Ditjen Bea dan Cukai.

Bila pemerintah terus berusaha, bagaimana dengan kita sebagai warga bangsa? Tentu saja kita juga bisa berkontribusi. Sebagai bagian dari bangsa, kita harus memiliki sikap positif bila berkeinginan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang unggul di masa depan. Meminjam pemikiran Jansen Kraemer Jr. (2015), untuk menjadi bangsa yang hebat, kita harus memiliki sikap yang seimbang (*balance*). Artinya, kita mampu melihat situasi dari *multiple perspectives*, termasuk sudut pandang yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman holistik.

Walaupun masyarakat berbeda pandangan dan calon presiden yang didukung, mari tetap kita jaga semangat persatuan dan kesatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan. Karena kita adalah bagian dari satu bangsa yang memiliki tujuan yang sama. Siapa kita? Indonesia!!!

***Lukas O. M. Manalu, M.M.**

Konsultan Bisnis & Dosen Praktisi di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.